



**SINERGI DINAS PERDAGANGAN DALAM MENJAGA STABILITAS  
STOK DAN HARGA BARANG POKOK DI KOTA  
BALIKPAPAN MENJELANG HBKN**

**Ranti Astuti, Tuti Wediawati**

Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Mulawarman

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sinergi lintas sektor yang dibangun melalui rapat koordinasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas stok dan harga barang kebutuhan pokok di Kota Balikpapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi dan analisis hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Dinas Perdagangan Kota Balikpapan. Kegiatan ini melibatkan Perum BULOG Kaltimtara, Pertamina Patra Niaga, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Satgas Pangan Polresta Balikpapan, serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sinergi antarinstansi telah membentuk kesiapan yang kuat dalam menjamin ketersediaan bahan pokok dan menekan potensi gejolak harga menjelang HBKN. Koordinasi lintas sektor ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pembagian peran yang jelas antar lembaga. Pengabdian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kebijakan publik dan pendidikan ekonomi melalui praktik kolaboratif yang konkret dalam pengendalian inflasi di tingkat daerah.

**Kata Kunci:** Sinergi, Dinas Perdagangan, Stabilitas Harga, Barang Pokok, HBKN.

**PENDAHULUAN**

Stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok merupakan salah satu indikator penting

dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan kestabilan ekonomi daerah. Fluktuasi harga bahan pokok, terutama menjelang Hari Besar

\*Correspondence Address : rantiastutiohs@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i12.2025. 4632-4639

© 2025UM-Tapsel Press

Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Natal dan Tahun Baru, seringkali menimbulkan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan, salah satunya melalui koordinasi dan sinergi lintas sektor antarinstansi yang terkait langsung dengan pengendalian harga dan distribusi bahan pokok (Barus, 2023).

Kota Balikpapan sebagai salah satu kota besar di Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi wilayah. Kegiatan distribusi dan perdagangan di kota ini sangat dipengaruhi oleh faktor logistik, pasokan antarwilayah, dan pola konsumsi masyarakat yang meningkat tajam pada periode menjelang HBKN. Dalam konteks ini, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa stok barang pokok seperti beras, minyak goreng, LPG, daging ayam, dan gula tetap aman serta harga tetap terkendali. Namun, upaya tersebut tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah pusat maupun daerah, lembaga vertikal, maupun pelaku usaha (Ariandini et al., 2024).

Sinergi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam menjaga ketahanan pangan dan kestabilan harga di tingkat daerah. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, kolaborasi antarlembaga dalam forum koordinasi mampu memperkuat efektivitas kebijakan pengendalian inflasi dan mempercepat respon terhadap dinamika pasar (Yurianto, 2020; Yopiannor, 2025). Dalam konteks Kota Balikpapan, peran lembaga seperti Perum BULOG Kaltimtara, Pertamina Patra Niaga, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Meteorologi Klimatologi dan

Geofisika (BMKG), Satgas Pangan Polresta Balikpapan, serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan menjadi sangat penting dalam mendukung keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Dinas Perdagangan.

Kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada akhir Oktober 2025 merupakan salah satu bentuk konkret sinergi antarlembaga dalam menghadapi periode HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Melalui forum ini, masing-masing instansi melakukan evaluasi stok, mengidentifikasi potensi kendala distribusi, serta merumuskan langkah antisipatif untuk mencegah gejolak harga di pasar. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, kegiatan pengabdian ini berupaya menguraikan bagaimana bentuk kolaborasi lintas sektor tersebut mampu menciptakan kesiapsiagaan daerah dalam menjaga stabilitas stok dan harga bahan pokok. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan publik, khususnya dalam bidang perdagangan dan pengendalian inflasi daerah.

Selain faktor distribusi dan koordinasi antarlembaga, dinamika pasar di Kota Balikpapan juga sangat dipengaruhi oleh aspek sosial ekonomi masyarakat serta pola konsumsi yang berubah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Dalam periode tersebut, peningkatan permintaan terhadap bahan pokok tidak hanya disebabkan oleh kebutuhan konsumsi rumah tangga, tetapi juga oleh aktivitas ekonomi tambahan seperti usaha kuliner musiman dan perdagangan eceran yang meningkat tajam. Fenomena ini menunjukkan adanya korelasi antara perilaku konsumtif masyarakat dengan tekanan terhadap sistem distribusi barang pokok di tingkat lokal (Siregar, 2021).

Oleh karena itu, peran pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada pengendalian harga melalui mekanisme pasar, tetapi juga harus memperhatikan dimensi edukatif dan sosialisasi kepada masyarakat agar pola konsumsi tetap rasional dan berkelanjutan. Upaya edukasi publik mengenai pentingnya belanja bijak, tidak melakukan penimbunan, serta memprioritaskan kebutuhan pokok menjadi bagian integral dari strategi menjaga stabilitas harga. Dinas Perdagangan bersama instansi terkait perlu membangun kesadaran kolektif bahwa stabilitas ekonomi daerah merupakan tanggung jawab bersama yang menuntut partisipasi aktif masyarakat.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan sistem logistik digital juga memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian harga bahan pokok di daerah. Transformasi digital dalam sektor perdagangan memungkinkan adanya sistem pemantauan harga secara real time yang dapat diakses oleh berbagai lembaga pemerintah maupun pelaku pasar. Hal ini membuka peluang untuk memperkuat transparansi informasi sekaligus mempercepat pengambilan keputusan dalam menghadapi potensi gejolak harga. Penerapan sistem informasi pasar berbasis digital, misalnya melalui aplikasi atau dashboard pemantauan stok dan harga, menjadi inovasi strategis yang dapat meningkatkan akurasi data dan mempercepat respon terhadap dinamika pasar (Ariandini, D., 2025). Dalam konteks Kota Balikpapan, penggunaan teknologi ini berpotensi memperkuat koordinasi antarinstansi dengan menyediakan basis data bersama yang valid dan terkini. Dengan demikian, integrasi antara kebijakan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor menjadi landasan utama bagi stabilitas ekonomi daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Sinergi lintas sektor yang

dibangun dalam menjaga ketersediaan bahan pokok juga harus dilihat sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Pengendalian harga dan stok tidak hanya berfungsi sebagai langkah jangka pendek untuk menstabilkan pasar menjelang HBKN, tetapi juga merupakan instrumen jangka panjang dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan adanya koordinasi yang konsisten, pemerintah daerah dapat memperkirakan kebutuhan pasokan untuk periode mendatang, mengidentifikasi potensi risiko logistik, serta memperkuat kapasitas kelembagaan di bidang perdagangan dan ketahanan pangan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip sustainable governance, di mana kolaborasi antarinstansi tidak hanya bersifat responsif terhadap krisis, melainkan juga proaktif dalam membangun sistem ekonomi lokal yang tangguh, efisien, dan berkeadilan. Dengan demikian, upaya Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dalam menjaga stabilitas harga dan stok bahan pokok menjelang HBKN dapat dipandang sebagai praktik nyata penerapan tata kelola kolaboratif yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta ketahanan ekonomi jangka panjang (Siregar, 2021).

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara nyata bentuk sinergi lintas sektor antarinstansi dalam menjaga stabilitas stok dan harga barang kebutuhan pokok di Kota Balikpapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, melakukan koordinasi

dengan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan guna mengumpulkan data awal terkait situasi ketersediaan stok serta dinamika harga berbagai bahan pokok di wilayah tersebut. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui observasi langsung pada rapat koordinasi antarinstansi yang dihadiri oleh Perum BULOG Kaltimtara, Pertamina Patra Niaga, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), BMKG, Satgas Pangan Polresta Balikpapan, serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan. Tahap evaluasi dilakukan dengan menganalisis hasil rapat dan notulen untuk menilai efektivitas kerja sama serta langkah antisipatif yang disepakati.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil koordinasi menunjukkan kesiapsiagaan seluruh instansi dalam menghadapi potensi lonjakan permintaan dan fluktuasi harga selama periode HBKN. Berdasarkan laporan BPS dan Bank Indonesia, inflasi Kota Balikpapan pada minggu ke-IV Oktober 2025 tercatat sebesar 0,03% (mtm), meningkat tipis dari deflasi 0,06% bulan sebelumnya namun masih dalam kategori terkendali. Kenaikan harga yang moderat ini dipengaruhi oleh komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan daging ayam ras. BULOG Kaltimtara memastikan stok beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kondisi aman dan siap didistribusikan ke seluruh pasar tradisional. Sementara itu, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan LPG 3 kg serta BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa liburan.

Selain itu, BMKG memberikan informasi prakiraan cuaca dan potensi gangguan distribusi akibat kondisi iklim, sedangkan Satgas Pangan melakukan pengawasan terhadap distribusi barang serta pencegahan praktik penimbunan.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan memastikan ketersediaan pasokan pangan lokal melalui koordinasi dengan petani dan pelaku usaha perikanan. Sinergi yang dibangun melalui forum koordinasi tersebut memperlihatkan pola kerja kolaboratif yang solid antarinstansi, di mana setiap lembaga menjalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai bidangnya. Koordinasi lintas sektor yang dilakukan berperan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam mengantisipasi gangguan pasokan dan gejolak harga. Hal ini sejalan dengan temuan Suhendra & Rahmat (2023) yang menegaskan bahwa koordinasi antarinstansi merupakan instrumen penting dalam pengendalian harga dan inflasi daerah karena memungkinkan deteksi dini terhadap potensi ketidakseimbangan pasokan.

Hasil kegiatan ini turut memperkuat temuan Yopiannor (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan collaborative governance dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sangat bergantung pada kejelasan pembagian peran serta efektivitas komunikasi lintas sektor yang terjalin di antara para pemangku kepentingan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Ariandini et al. (2024) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pengendalian harga pangan di daerah ditentukan oleh peran aktif pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga logistik, sektor energi, dan lembaga statistik.

Selanjutnya, hasil temuan ini juga konsisten dengan pengabdian yang dilakukan oleh Barus (2023) dalam MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah yang menerapkan mekanisme koordinasi antarsektor secara rutin mampu menjaga keseimbangan harga dan ketersediaan

pangan strategis. Sinergi di Kota Balikpapan memperlihatkan penerapan prinsip yang sama, di mana forum koordinasi tidak hanya membahas kondisi pasar terkini, tetapi juga menetapkan langkah antisipatif bersama.

Selain itu, kegiatan ini memperkuat hasil pengabdian oleh Putri & Hafiza (2023) yang menemukan bahwa sinergi antara lembaga pangan dan sektor energi dapat memperkuat ketahanan ekonomi lokal menjelang periode konsumsi tinggi. Dengan demikian, bentuk koordinasi yang dilakukan di Kota Balikpapan merupakan contoh nyata penerapan collaborative governance dalam pengendalian inflasi daerah yang efektif dan adaptif.

Selain aspek teknis dalam pengendalian pasokan dan harga, hasil kegiatan menunjukkan bahwa keberhasilan sinergi lintas sektor di Kota Balikpapan juga ditentukan oleh efektivitas komunikasi dan koordinasi antarinstansi. Setiap lembaga memiliki mekanisme pelaporan dan pemantauan mandiri yang kemudian diintegrasikan dalam forum koordinasi, sehingga seluruh data dan informasi yang beredar dapat diverifikasi secara cepat dan akurat. Proses ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih tepat waktu, misalnya dalam menentukan langkah distribusi cadangan beras, pengaturan jadwal suplai LPG, maupun rekomendasi kebijakan harga eceran tertinggi (HET) pada komoditas strategis (Nadilla, N., 2024). Dinas Perdagangan berperan sebagai simpul koordinasi yang menghubungkan seluruh lembaga teknis, sedangkan Bank Indonesia dan BPS memberikan landasan analisis ekonomi makro untuk memprediksi tren inflasi menjelang HBKN. Dengan demikian, keterpaduan antara data empiris, kebijakan administratif, dan kebijakan ekonomi menjadi faktor penting dalam

keberlanjutan pengendalian harga bahan pokok.

Forum koordinasi antarinstansi juga menciptakan ruang dialog partisipatif antara pemangku kepentingan publik dan sektor swasta. Pelibatan pelaku usaha, distributor, serta pengelola pasar dalam rapat koordinasi terbukti mampu meningkatkan transparansi rantai pasok dan mengurangi potensi praktik spekulatif di pasar. Diskusi terbuka mengenai stok dan distribusi barang menciptakan rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas harga (Siregar, 2023). Dalam hal ini, Dinas Perdagangan berperan tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaku usaha lokal memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah, misalnya dengan menjaga margin keuntungan pada tingkat yang wajar dan memprioritaskan pasokan bagi pasar tradisional selama periode permintaan tinggi. Pola kolaborasi ini mencerminkan penerapan prinsip good governance dalam praktik ekonomi daerah, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen utama dalam menjaga stabilitas pasar.

Sinergi lintas sektor di Kota Balikpapan berimplikasi pada penguatan ketahanan ekonomi daerah dalam jangka panjang. Melalui koordinasi rutin, setiap instansi memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap peran dan kontribusinya dalam ekosistem ekonomi lokal. Kegiatan ini juga meningkatkan kapasitas kelembagaan, karena setiap pihak terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan secara berkesinambungan. Efek jangka panjangnya terlihat dari peningkatan efisiensi distribusi barang pokok, penurunan potensi kelangkaan pasokan, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah

dalam menjaga stabilitas harga. Dengan adanya sinergi ini, Dinas Perdagangan bersama lembaga terkait mampu menciptakan sistem ketahanan pangan daerah yang adaptif terhadap dinamika pasar dan kondisi eksternal, termasuk faktor cuaca, fluktuasi harga global, maupun gangguan logistik. Hal ini memperkuat posisi Kota Balikpapan sebagai model praktik kolaborasi lintas sektor yang efektif dalam pengendalian inflasi daerah serta dapat menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia (Sela, 2021).

Selain capaian sinergi dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan efektivitas koordinasi antarinstansi melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan yang dilakukan setelah rapat koordinasi utama. Setiap lembaga diwajibkan menyusun laporan tindak lanjut atas hasil kesepakatan rapat, termasuk pembaruan data stok, distribusi, dan kendala lapangan yang dihadapi. Proses ini menciptakan sistem pelaporan berjenjang yang memungkinkan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan memantau perkembangan secara periodik tanpa harus menunggu pertemuan formal berikutnya. Dengan adanya sistem evaluasi ini, kebijakan pengendalian harga dapat segera disesuaikan terhadap perubahan situasi pasar. Misalnya, ketika terjadi peningkatan harga beras di beberapa pasar tradisional, BULOG Kaltimtara dapat segera melakukan operasi pasar dengan dukungan dari Satgas Pangan dan aparat wilayah untuk menekan spekulasi harga. Mekanisme kerja cepat ini memperlihatkan bahwa koordinasi yang efektif tidak hanya bergantung pada rapat formal, tetapi juga pada kemampuan lembaga untuk bertindak responsif berdasarkan hasil pemantauan rutin.

Koordinasi lintas sektor tidak hanya berdampak pada stabilitas

ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas institusional masing-masing lembaga yang terlibat. Melalui keterlibatan aktif dalam forum koordinasi, setiap instansi memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang dinamika sektor lain dan pentingnya kolaborasi lintas bidang. Hal ini mendorong munculnya inovasi kebijakan internal, seperti pengembangan sistem monitoring digital oleh Dinas Ketahanan Pangan serta peningkatan transparansi distribusi melalui publikasi data stok oleh BULOG Kaltimtara (Ariandini, D., 2025). Inovasi tersebut memperkaya praktik tata kelola publik di tingkat daerah dan menjadikan Kota Balikpapan sebagai contoh penerapan collaborative governance yang adaptif terhadap tantangan ekonomi modern. Selain itu, keterlibatan lembaga seperti Bank Indonesia dan BPS memberikan dimensi analisis yang lebih komprehensif, di mana kebijakan mikro yang dilakukan oleh dinas teknis dapat disinergikan dengan kerangka kebijakan makro ekonomi yang lebih luas. Integrasi antara kebijakan teknis dan analisis ekonomi makro ini menjadi kekuatan utama dalam menciptakan sistem pengendalian harga yang berkelanjutan.

Dampak sosial dari sinergi lintas sektor ini juga cukup signifikan. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pelaku pasar, diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah berhasil meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pengendalian harga. Para pedagang menilai bahwa langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga ketersediaan stok membantu menjaga kestabilan aktivitas perdagangan, terutama di pasar tradisional. Kepercayaan publik ini memperkuat legitimasi kebijakan dan menciptakan efek psikologis positif di kalangan konsumen yang cenderung lebih tenang menghadapi fluktuasi harga.

Secara sosiologis, hal ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh kinerja kebijakan ekonomi formal, tetapi juga oleh aspek kepercayaan sosial yang dibangun melalui komunikasi terbuka antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat (Nadilla, N., 2024). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap ketebalan harga jangka pendek, tetapi juga memperkuat hubungan sosial-ekonomi yang berkelanjutan sebagai fondasi bagi ketahanan ekonomi daerah.

## SIMPULAN

Hasil keseluruhan kegiatan menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor yang dilakukan di Kota Balikpapan memberikan dampak nyata terhadap terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Kolaborasi antarinstansi yang terbangun melalui rapat koordinasi rutin berhasil menciptakan sistem kerja yang sinergis, transparan, dan responsif terhadap dinamika pasar. Setiap lembaga yang terlibat berperan secara optimal sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya, sehingga langkah-langkah pengendalian dapat dilakukan lebih cepat, terarah, dan tepat sasaran.

Kekuatan utama dari sinergi tersebut terletak pada pola komunikasi yang terbuka dan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Melalui mekanisme kerja yang terkoordinasi, pemerintah daerah mampu merumuskan kebijakan yang berbasis data empiris dan memperhatikan hasil analisis situasi lapangan dari masing-masing instansi terkait. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan efisiensi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat kepercayaan antar lembaga dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi

tantangan ekonomi menjelang periode konsumsi tinggi.

Dampak positif dari koordinasi ini turut dirasakan oleh masyarakat secara langsung, terutama melalui terjaganya harga bahan pokok pada tingkat yang wajar serta terjaminnya ketersediaan barang di pasaran. Situasi tersebut menunjukkan bahwa model kerja kolaboratif lintas sektor dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun ketahanan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi yang terwujud tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi refleksi nyata dari implementasi collaborative governance yang mampu memperkuat fondasi ekonomi daerah secara sistematis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Ariandini, D., Soerjatsnanta, H., Firmansyah, A. A., & Adhan S. S. (2025). Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3).

Barus, H. P. (2023). Analisis Kegiatan Monitoring Harga Pasar Di Bidang Perdagangan Dalam Negeri (Studi Kasus Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6343-6350.

Dinas Perdagangan Kota Balikpapan. (2025). Laporan Rapat Koordinasi Pemantauan Stok dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Kota Balikpapan Menjelang HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Balikpapan: Penulis.

Lubis, I. A., Maharani, D., & Dristyan, F. (2024). Sistem Penjualan berbasis Web menggunakan Metode Supply Chain Managemen untuk Manajemen Persediaan Barang. *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, 8(2), 447-456.

Rahman, H. (2020). Analisis efektivitas sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok (SP2KP) terhadap stabilitas harga barang kebutuhan pokok di Kota Makassar. *Economic Bosowa Journal*, 6(005).

Yopiannor, F. Z. (2025). Kolaborasi

aktor dalam upaya pengendalian inflasi daerah di Kota Palangka Raya. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL)*, 4(2).

Yurianto, H. (2020). Analisis kebijakan pengendalian inflasi DKI Jakarta. *Balance: Economic, Business, Management, and Accounting Journal*, 17(1).

Sela, O. F. (2021). Pengawasan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam perspektif ekonomi Islam. *IAIN Ponorogo*.

Siregar, I. R. (2023). Analisis peran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Pasar Sukaramai. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 6351–6357.

Nadilla, N., & Ierdiana, W. (2024). Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) dalam menjaga stabilitas harga cabai di Pasar Bintan Center Kota Tanjungpinang. *Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan*, 3(1), 150–159.

Ariandini, D., Soerjatsnanta, H., & Firmansyah, A. A. (2025). Kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1886–1894.

Siregar, S. N., & Rokan, M. K. (2021). Peran Disdagper (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Pasar Bahagia dan Pasar Suprapto Kota Tanjungbalai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8246–8252.